

Sistem Bagi Hasil Dalam Menentukan Pendapatan Petani Padi Penggarap Di Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone

Marniati Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui sistem bagi hasil yang dilakukan petani penggarap di Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone dan (2) Untuk mengetahui pendapatan petani berdasarkan sistem bagi hasil yang di sepakati. Objek dari penelitian ini adalah masyarakat petan Penggarap Di Desa Tunrreng Tellue Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. Teknik pengambilan sampel acak sederhana (*simple Random Sampling*), yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan penelitian sesuai dengan tujuan peneliti. metode induktif, deduktif dan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone adalah bagi 2 dan bagi 3. Akan tetapi sistem yang banyak dilakukan yaitu bagi 2, maksudnya pemilik sawah dan petani penggarap mendapatkan hasil panen yang sama besar karena biaya yang dikeluarkan selama masa tanam hingga masa panen ditanggung oleh pemilik sawah dan penggarap. Dan (2) Besarnya pendapatan petani penggarap tergantung dari sistem bagi hasil yang di sepakati. Apabila sistem bagi hasil yang disepakati adalah bagi 3 maka penggarap lebih banyak mendapatkan hasil panen dibanding dengan pemilik tanah, dan apabila sistem bagi hasil yang disepakati adalah bagi 2 maka pemilik tanah dan penggarap mempunyai pendapatan yang sama besar.

Kata Kunci :Sistem bagi hasil dan pendapatan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris dimana sektor pertanian memegang peranan yang sangat penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini menyebabkan sebagian besar penduduk atau tenaga kerja menggantungkan hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian. Dengan ciri perekonomian agraris, maka lahan pertanian merupakan faktor produksi yang sangat besar artinya bagi petani. Perbedaan penguasaan terhadap jumlah dan mutu lahan mengakibatkan perbedaan produksi dan pendapatan dalam sektor pertanian. Pendapatan yang diterima oleh petani menentukan pola konsumsi dan tabungan petani.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang banyak memberikan sumber kehidupan bagi rakyat Indonesia dan penting dalam pertumbuhan

perekonomian hal tersebut diantaranya berkaitan dengan letak geografis dan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian, sehingga memungkinkan pengembangan sektor ini salah satu usaha dalam memacu pembangunan nasional. Salah satu sektor pertanian yang masih akan terus dikembangkan adalah tanaman pangan. Sektor pertanian ini diharapkan dapat berperan dalam penyediaan pangan terutama tanaman padi yang cukup bagi kehidupan masyarakat bangsa ini. Begitu juga halnya dengan kebutuhan dalam sektor pertanian lebih spesifik wilayah yaitu di provinsi Sulawesi Selatan yang sampai saat ini masih memegang peranan utama dalam perkembangan perekonomian Sulawesi Selatan. Sektor pertanian khususnya tanaman pangan padi diharapkan dapat berperan dalam penyediaan pangan yang cukup bagi

kehidupan penduduk do provinsi sulawesi selatan.

Komoditas padi sawah adalah salah satu tanaman panagn yang sangat penting dan strategis kedudukanya sebagai sumber penyediaan kebutuhan pangan pokok yaitu berupa beras.Beras berrkaitan erat hubungannya dengan kebutuhan rakyat banyak dan dapat dijadikan sebagai alat politik. Jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan kebutuhan akan beras pun semakin meningkat. Namun produk jadi cenderung stagnan bahkan menurun dan kondisi kesejahteraan petani itu sendiri juga terus mengalami penurunan.

Dalam tatanan pertanian pedesaan, secara garis besar sistem penguasaan lahan dapat diklasifikasikan statusnya menjadi hak milik, sewa, sakap (bagi hasil), dan gadai.Status hak milik adalah lahan yang dikuasai dan dimiliki oleh perorangan atau kelompok atau lembaga/ organisasi .Pakpahan(1992) *dalam*Irmayanti (2010) mengemukakan bahwa status sewa, sakap (bagi hasil), dan gadai adalah bentuk-bentuk penguasaan lahan dimana terjadi pengalihan hak garap dari pemilik lahan kepada orang lain. Bentuk kelembagaan ini sudah menjadi bagian dari tatanan masyarakat pedesaan dimana keberadaanya bersifat dinamis antar ruang dan waktu.Jadi terlihat bahwa lahan merupakan faktor produksi utama dalam usaha pertanian. Dengan kata lain, eksistensi lahan dapat digarap sebagai tumpuan dalam produksi usaha tani yang dapat mendatangkan kesempatan kerja dan perolehan imbalan (pendapatan).

Suatu usahatani yang dilaksanakan secara terpadu pada dasarnya badalah untuk meningkatkan pendapatan petani agar dapat menghidupi seluruh keluarganya sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani tersebut (Mubiyarto, 1989 *dalam*Isyanto, 2012). Tujuan petani dalam melaksanakan usahataniya adalah untuk memperoleh produksi yang tinggi dengan biaya yang rendah (Adilaga, 1993 *dalam*Isyanto, 2012).

Menurut Soekartawi (1995), pendapatan merupakan selisih antara penerimaan dan semua biaya. Biaya memegang peranan yang sangat penting untuk dibandingkan denagn pendapatan yang akan diperoleh. Selain itu lembaga pemasaran juga berperan didalam menyalurkan hasil produksi petani yang berpengaruh pada tingkat harga yang akan diterima oelh petani.

Mosher, (1977) *dalam*isyanto, (2012) menyatakan, bahwa peningkatan pendapatan akan diperoleh bukan saja oleh pengetahuan bercocok tanam saja, tetapi juga ditentukan oleh pembiayaan, pemasaran dan kepandaian petani dalam menggunakan faktor-faktor produksi yang sangat terbatas jumlahnya.

Mardikanto (1990) *dalam*Isyanto, (2012) juga menyatakan, bahwa rendahnya pendapatan petani disebabkan oleh:

1. Sempitnya luas lahan usahatani yang dimiliki
2. Rendahnya produktivitas usahatani karena keterbatasan peralatan dan teknologi yang diterapkan serta keterbatasan petani kecil untuk menggunakan input-output modern (seperti: benih, pupuk buatan dan pestisida).
3. Sistem pemasaran yang seringkali tidak menguntungkan petani kecil dan
4. Keterbatasan penghasilan dari sektor lain (diluar usahataniya) karena rendahnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki.

Berbicara tentang pendapatan penghasilan berarti penghasilan yang diterima oleh seorang individu, daerah maupun negara dari semua kegiatan yang dilakukan.Pendapatan bagi seseorang sangat penting artinya karena dengan pendapatan yang dimilikinya maka seseorang dapat memenuhi kebutuhan sekunder dalam mencapai tingkat kepuasan maksimal.

Di daerah penelitian yakni di desa Tunreng Tellue Kabupaten Bone, banyak petani yang mengusahakan tanaman padi

sawah, dimana status penguasaan lahan yang berbeda yakni petani yang mengolah atau menggarap lahan sendiri (petani pemilik penggarap), petani yang menggarap lahan orang lain dengan sistem bagi hasil (petani penyakap), petani yang menyewa lahan orang lain dan petani yang tinggal di desa lain tetapi memiliki dan menggarap lahan di daerah penelitian. Namun yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah petani pemilik penggarap dan petani penyakap. Dalam perbedaan sistem kepemilikan lahan ini tentunya akan menimbulkan perbedaan dalam penerimaan petani. Selain itu tingkat pendapatan dan tingkat efisiensi pada usahatani mereka juga akan berbeda pula.

Bagi hasil merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pihak yang mempunyai lahan menyerahkan lahannya kepada pihak petani atau penggarap untuk diusahakan sebagai lahan yang menghasilkan, sehingga pihak pemilik lahan untuk bercocok tanam juga dapat berusaha serta dapat memperoleh hasil yang sama dari lahan tersebut.

Bagi hasil Pertanian di Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone dilihat dari segi ekonomi yaitu pemilik sawah memberikan izin kepada orang lain untuk mengerjakan sawahnya dengan perjanjian, bahwa yang mendapat izin itu harus memberikan sebagian yaitu dari hasil yang di dapat. Di desa ini buruh tani memperoleh penghasilan dari upah bekerja pada sawah pertanian milik orang lain.

Sistem pembagian hasil panen di Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone pemilik sawah serta penggarap sawah sama-sama mendapatkan hasil panen apabila pupuk benih padi serta lain-lainnya dibiayai oleh kedua belah pihak (biaya keseluruhan sampai tanaman dapat dipanen ditanggung oleh kedua belah pihak). Bagi masyarakat di Desa Tunreng Tellue pada umumnya pekerjaan

ini dilakukan oleh orang yang memiliki sebidang sawah yang relatif tidak luas. Agak berbeda dengan orang yang mempunyai sawah yang luas pemilik sawah sebagian diantaranya harus digarap oleh orang lain dengan sistem bagi hasil.

Masalah pokok pada sistem bagi hasil ini yaitu adanya lahan sawah yang kosong yang tidak ditanami oleh pemilik sawah sehingga masyarakat yang memiliki lahan sempit mengusahakan agar lahan sawah tersebut bisa mendapatkan hasil atau keuntungan sehingga hasil pada lahan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Masyarakat dalam kehidupannya memiliki peranan dan manfaat yang sangat penting. Dalam bagi hasil merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya, pihak yang mempunyai lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk diusahakan sebagai lahan yang menghasilkan. Sehingga pihak pemilik sawah dapat menikmati hasil lahannya dan penggarap juga menikmati hasil sawah yang mereka garap.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone dengan judul **“Sistem Bagi Hasil Dalam Menentukan Pendapatan Petani Penggarap Di Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone”**

METODE

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini metode survey yaitu metode pengamatan atau penyelidikan untuk melihat pelaksanaan sistem bagi hasil dan keuntungan yang diperoleh baik pemilik lahan maupun petani penggarap.

Populasi penelitian ini adalah petani padi sawah yang menjadi petani penggarap lahan sawah milik orang lain yang berada di Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue. Berdasarkan data yang diperoleh. Jumlah penduduk desa yang sebagai petani penggarap sebanyak 200 orang.

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu :

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan petani responden menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, yang jawabannya diberikan secara terbuka dan ada juga yang tertutup. dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari instansi atau lembaga yang terkait langsung dengan penelitian ini seperti kantor desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 6. Sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone

No	Nama	Sistem Bagi Hasil	Hasil Panen (Karung)	Pendapatan	
				Pemilik	Penggarap
1	Sahibe	2	50	25	25
2	Battiar	3	30	10	20
3	M. ijhar	3	70	23	47
4	Nardi	2	20	10	10
5	Jusman	2	30	15	15
6	Bakri	2	60	30	30
7	Saharuddin	3	90	30	60
8	Burhan	2	40	20	20
9	Sudi	2	34	17	17
10	Alwi	2	50	25	25
Jumlah		30	474	205	269

Sumber : data prime Tahun 2018.

Dari tabel 6 diatas menunjukkan bahwa besarnya pendapatan pemilik sawah dan penggarap tergantung dari sistem bagi hasil Yang disepakati antara pemilik sawah dan penggarap. Dapat kita lihat bahwa apabila sistem bagi hasil yang dilakukan atau disepakati yaitu bagi 2 atau dengan kata lain seluruh biaya yang dikeluarkan selama masa tanam hingga panen ditanggung berdua maka hasil panennya pun dibagi dua dan begitu pula dengan sebaliknya apabila sistem bagi hasil yang disepakati antara pemilik dan penggarap yaitu bagi 3 atau dengan kata lain selama masa tanam hingga masa panen biayanya ditanggung oleh penggarap maka hasil panennya dibagi 3 maka pendapatan penggarap lebih banyak dibandingkan dengan si pemilik.

Tabel 7. Pembagian Bagi Hasil sebagai Berikut:

No	Nama	Sistem Bagi Hasil	Hasil Panen (Karung)	Pendapatan	
				Pemilik	Penggarap
1	Sahibe	2	50	25	25
2	Battiar	2	30	15	15
3	M. ijhar	2	70	35	35
4	Nardi	2	20	10	10
5	Jusman	2	30	15	15
6	Bakri	2	60	30	30
7	Saharuddin	3	90	45	45
8	Burhan	2	40	20	20
9	Sudi	2	34	17	17
10	Alwi	2	50	25	25
Jumlah		23	474	237	237

Sumber : data prime Tahun 2018

Dari table 7 di atas menunjukkan bahwa apabila sistem bagi hasil yang dilakukan atau yang disepakati yaitu bagi 2 atau dengan kata lain seluruh biaya yang dikeluarkan selama masa tanam hingga panen ditanggung berdua maka hasil panennya pun di bagi dua maka pendapatan petani penggarap dan pemilik sawah memiliki pendapatan yang sama yaitu sebanyak 237.

Tabel 5. Pembagian Bagi Hasil sebagai Berikut:

No	Nama	Sistem Bagi Hasil	Hasil Panen (Karung)	Pendapatan	
				Pemilik	Penggarap
1	Sahibe	3	50	20	30
2	Battiar	3	30	10	20
3	M. ijhar	3	70	23	47
4	Nardi	3	20	7	13
5	Jusman	3	30	10	20
6	Bakri	3	60	25	35
7	Saharuddin	3	90	45	45
8	Burhan	3	40	15	25
9	Sudi	3	34	13	21
10	Alwi	3	50	20	30
Jumlah		30	474	188	286

Sumber : data prime Tahun 2018

Dari tabel 8 di atas menunjukkan bahwa apabila sistem bagi hasil yang dilakukan atau yang disepakati yaitu bagi 3 maka pendapatan petani penggarap lebih banyak dibanding dengan pemilik sawah dikarenakan selama masa tanam hingga masa panen biayanya di tanggung oleh penggarap.

Dapat kita lihat pada tabel perbandingan antara sistem bagi hasil 2 dan bagi hasil 3 terlihat jelas bahwa apabila sistem bagi hasil yang dilakukan adalah bagi 3 maka penggarap lebih banyak mendapatkan hasil panen dibandingkan dengan pemilik sawah. Akan tetapi sistem bagi hasil yang banyak dilakukan di desa tunreng tellue kecamatan sibulue adalah bagi 2 dikarenakan dengan alasan-alasan tertentu

Dari hasil penelitian yang didapatkan dari data dan informasi dilapangan dengan wawancara terhadap pemilik tanah dan penggarap sawah mengenai sistem bagi hasil dan pendapatan petani sawah di Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, penulis akan membahas hasil dari penelitian yang berkenaan dengan bentuk pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah di Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone beserta pengaruhnya terhadap pendapatan petani penggarap.

Perjanjian bagi hasil terhadap tanah pertanian sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat di Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. Hal ini disebabkan karena suatu keadaan tertentu, pemilik tanah tidak dapat mengolah sawahnya sendiri, kemudian pemilik menawarkan kepada orang lain atau keluarga yang bersedia mengolah tanahnya dengan cara bagi hasil. Akan tetapi ada juga pihak penggarap yang sengaja meminta kepada pemilik sawah agar memberikan ajin untuk menggarap lahan pertaniannya.

Penggarapan sawah dengan cara bagi hasil telah lama dilakukan oleh masyarakat di Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. Pelaksanaan bagi hasil terhadap tanah pertanian didasarkan kepada kebiasaan-kebiasaan yang telah ada atau juga

sering dengan hukum adat. Pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di Desa ini lebih banyak menggunakan sistem bagi 2 daripada bagi 3.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, didapat data bahwa sebagian besar masyarakat di desa tersebut dalam melakukan perjanjian bagi hasil dalam bentuk secara lisan, tanpa harus ada perjanjian dalam bentuk tertulis. Hal ini sangat tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, dikarenakan dalam perjanjian tersebut dilakukan dengan lisan tanpa adanya bukti tertulis.

Menurut Subekti (1985:17), untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap dalam membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal
4. Suatu sebab yang halal.

Sangat jelas apa yang diterapkan oleh masyarakat Desa Tunreng Tellue tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku karena mereka melakukan perjanjian bagi hasil secara lisan. Alangkah baiknya mereka melakukan perjanjian secara tertulis agar ada kekuatan hukum yang mengikat dalam bidang kerjasama tersebut.

Bentuk perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone dilakukan secara lisan didasarkan pada rasa saling percaya dan rasa kekeluargaan dari masing-masing pihak, baik pemilik tanah maupun penggarap sawah. Hal ini dianggap lebih praktis dan lebih sederhana dibandingkan dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil yang terlalu berbelit-belit dan repot untuk diterapkan.

Ketentuan yang terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yang menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing untuk pemilik dan penggarap, namun tidak demikian yang terjadi di Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone yang dalam melakukan pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini hanya menggunakan bentuk lisan saja. Perjanjian tersebut hanya didasarkan pada kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu penggarap dan pemilik sawah.

Menurut masyarakat di Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone perjanjian tersebut sudah dianggap sah dan hanya tinggal melaksanakannya saja, tanpa memandang syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang pelaksanaan bagi hasil beserta hal-hal pokok yang menjadi dasar dan syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Kesederhanaan dan kepraktisan perjanjian bagi hasil inilah yang menyatakan para

penggarap dan pemilik sawah lebih menyukai perjanjian secara lisan sesuai dengan adat setempat daripada bentuk perjanjian secara tertulis seperti yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang pelaksanaan bagi hasil.

Masyarakat Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone telah mengenal sistem bagi hasil tanah pertanian, gadai, sewa, ataupun jual beli tanah. Akibat dari pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan tidak tertulis ini adalah apabila terjadi sengketa dikemudian hari maka sulit untuk membuktikan pihak mana yang dirugikan karena tidak adanya saksi-saksi yang menyaksikan awal mula perjanjian tersebut dibuat. Selain itu, tidak ada bukti-bukti tertulis yang menerangkan adanya perjanjian bagi hasil terhadap tanah pertanian beserta syarat-syaratnya.

Timbulnya perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Tunreng Tellue Kabupaten Bone dikarenakan pemilik sawah dalam keadaan tertentu tidak dapat mengolah sawahnya sendiri karena tidak memiliki waktu dikarenakan oleh kesibukannya dan ada pula penggarap yang tidak memiliki tanah sawah oleh karena itu petani penggarap melakukan perjanjian bagi hasil.

Pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan di Desa Tunreng Tellue menggunakan sistem yang berdasarkan pada tiga musim tanam. Sistem pembagian bagi hasil tanah pertanian ini pemilik dan penggarap sawah mendapatkan setengah bagian apabila semua biaya pengolahan sawah ditanggung oleh pemilik sawah, sedangkan pemilik mendapatkan sepertiga bagian

apabila semua biaya pengolahan sawah ditanggung oleh penggarap sawah. Biaya-biaya tersebut meliputi pembelian pupuk, bibit, dan obat-obatan yang digunakan dalam pengolahan sawah. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian antara penggarap dan pemilik lahan pertanian menerima hasil pertaniannya tergantung dari sistem bagi hasil yang dilakukan.

Dalam bagi hasil tanah pertanian terdapat tiga unsur pokok yaitu pemilik tanah, penggarap sawah dan tanah garapan. Pemilik tanah adalah orang yang mempunyai tanah pertanian yang mana karna keadaan tertentu menyerahkan hak pengerjaan tanahnya kepada orang lain yang disebut penggarap sawah. Penggarap sawah yaitu orang yang mengerjakan tanah pertanian milik pemilik tanah dan mendapatkan bagian dari hasil sawah sesuai dengancara pembagian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sawah garapan adalah suatu lahan yang menjadi objek pengolah yang dimiliki oleh pemilik tanah dan kemudian diserahkan kepada pihak penggarap dengan tujuan mendapatkan hasil.

Pada kenyataan yang ada jangka waktu perjanjian bagi hasil di Desa Tunreng Tellue ini sendiri adalah satu (1) tahun terdiri dari tiga (3) kali dalam masa tanam, apabila ingin diteruskan setelah jangka waktu selesai, maka penggarap sawah harus mendapatkan persetujuan dulu dari pemilik tanah. Hal ini juga mempunyai alasan yang sama yaitu karna adanya kebiasaan dan rasa saling percaya. Hal-hal yang melandasi adanya kepercayaan bagi para pihak, yaitu karna mereka sudah saling kenal dalam waktu yang cukup lama, dan hidup bertetangga

ataupun masih ada hubungan bersaudara.

Kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap. Dalam hal pertanian, kewajiban akan membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dibebankan kepada pemilik tanah pertanian tersebut. Hal ini disebabkan, tanah pertanian mempunyai status pihak milik yang masih dibebankan pajak diatasnya.

Dalam menentukan besarnya pendapatan petani penggarap disisni tergantung dari sistem yang di sepakati antara pemilik tanah dan penggarap. Apabila sistem bagi hasil yang di sepakati adalah bagi 3 (tiga) maka sipenggarap lebih banyak mendapatkan hasil panen dibanding pemilik tanah dan apabila sistem bagi hasil yang disepakati adalah bagi 2 (dua) maka penggarap dan pemilik tanah mendapatkan hasil yang sama.

Seperti yang kita lihat pada tabel sebelumnya bahwa yang lebih banyak mendapatkan hasil panen yaitu sistem bagi hasil bagi 3, akan tetapi di Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone lebih banyak menggunakan sistem bagi hasil bagi 2 (dua) daripada sistem bagi hasil bagi 3 (tiga).

PENUTUP

Kesimpulan

1. Sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone adalah bagi 2 dan bagi 3. Akan tetapi sistem yang banyak dilakukan yaitu bagi 2, maksudnya pemilik sawah dan petani penggarap mendapatkan hasil panen yang sama besar karena biaya yang dikeluarkan selama masa tanam hingga masa panen ditanggung oleh pemilik sawah dan penggarap.
2. Besarnya pendapatan petani penggarap tergantung dari sistem bagi hasil yang di sepakati. Apabila sistem bagi hasil yang disepakati adalah bagi 3 maka penggarap lebih banyak mendapatkan hasil panen dibanding dengan pemilik tanah, dan apabila sistem bagi hasil yang disepakati adalah bagi 2 maka pemilik tanah dan penggarap mempunyai pendapatan yang sama besar.

DAFTAR PUSTAKA

Adhe Negara, 2013. *Pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang*. Fis. Universitas Negeri Semarang

A. Rahmat, "Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian (Studi Kasus di Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lembo)" Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Raden Fatah Palembang: 2011

Evi Tamala, "Sistem Bagi Hasil Getah Karet Pada Perkebunan Masyarakat Desa Talang Selem Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir Dalam Perspektif Ekonomi Islam" . Fakultas Febi UIN Raden Fatah Palembang, 2014,

Moleong, Lexy. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Daniel, Mochtar. 2001. Pengantar Ekonomi Pertanian. PT Bumi Aksara, Jakarta
Irmayanti. 2010. Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Lahan dengan Petani Penggarap Usahatani Lahan Sawah di Desa Bontotallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin.

Mosher, 1995. Ilmu Usahatani. Penerbit : UGM, Yogyakarta

Pane, Ely Astuti. 2013. Sistem Bagi Hasil dan Pendapatan Petani Padi di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu.

Husein, "Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2002

Rika. "Sistem Bagi Hasil Masyarakat Petani di Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru". Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, 2017

Abdul Hafid, 1997/1998. *Perjanjian Bagi Hasil (Teseng) Menurut Hukum Adat di Kabupaten Maros*, Makassar : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Perlindungan AP., *Undang-Undang Bagi Hasil*, (Suatu Studi Komparatif, Bandung: Mandar Mamuju, 1991)

Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu*

Mubyarto. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Jakarta: Erlangga, 1985

Putong, Iskandar. *Pengantar Ekonomi Mikro & Makro*, edisi 2 Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003

Lexy J.Moleong,1999, *metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung

Soekartawi. 1994. *Pembangunan Pertanian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Hardjosudarmo, Soedigdo. 1970. *Masalah Tanah di Indonesia*. Jakarta:Bhratara